

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem ekonomi global modern, perdagangan menjadi salah satu bentuk utama interaksi antarnegara. Perdagangan internasional adalah serangkaian aktivitas perdagangan antarnegara yang mencakup transaksi ekspor dan impor lintas batas wilayah negara.¹ Perdagangan internasional menjadi aktivitas pertukaran barang dan jasa antarnegara yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Perdagangan internasional berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, mempererat hubungan diplomatik, serta memfasilitasi transfer teknologi di Indonesia. Aktivitas ini memberikan dampak positif berupa peningkatan devisa dan perluasan kesempatan kerja.²

Praktik perdagangan internasional tidak selalu berlangsung secara bebas karena dipengaruhi oleh kebijakan negara seperti tarif impor dan hambatan perdagangan lainnya. Kebijakan tersebut sering digunakan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, sehingga perdagangan internasional kerap berkaitan erat dengan dinamika politik dan diplomasi antarnegara. Kebijakan perdagangan tersebut tercermin dalam hubungan dagang antarnegara secara bilateral. Dalam praktiknya, kebijakan perdagangan suatu negara juga memengaruhi hubungan dagang bilateral, termasuk salah satunya yaitu antara Indonesia dan India.

¹ M. S. Amir, *Ekonomi Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

² A. Sudarmaji dan D. Sihombing, "Peran Perdagangan Internasional dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 20, no. 3 (2021): 108–118.

Dalam kerangka hubungan bilateral tersebut, hubungan kedua negara terimplementasikan lewat perjanjian maupun deklarasi yang telah disepakati seperti ASEAN-India *Free Trade Area* (AIFTA), penandatanganan Perjanjian Perdagangan Preferensial (*Preferential Trade Agreement*) di tahun 2020. Disisi lain, kerja sama di sektor agrikultur juga telah berlangsung sejak penandatanganan *Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation* tahun 1992, dengan fokus utama pada peningkatan kolaborasi perdagangan CPO.³ Dengan adanya kerjasama kedua negara dapat meningkatkan ekspor dan impor yang cukup signifikan.

Bagi Indonesia, India merupakan pasar utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara melalui ekspor. Komoditas yang paling banyak diekspor menurut sumber resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia antara lain batu bara (7.256 juta USD), *Palm Oil* (4.516 juta USD), baja tahan karat (1.254 juta USD), bijih tembaga (931 juta USD) dan Perhiasan (466 juta USD).⁴ Mayoritas *palm oil* yang masuk ke India dimanfaatkan untuk kebutuhan kuliner terutama diolah menjadi minyak goreng dan sebagian lainnya digunakan untuk pada sektor non-pangan seperti bahan baku diesel, kosmetik dan deterjen. Tingginya permintaan tersebut mengharuskan India mengimpor *palm oil* dalam jumlah besar. Indonesia merupakan pemasok utama minyak sawit ke India dengan

³ W. Purba dan D. Ardiyanti, "Dinamika Kerjasama Perdagangan Indonesia dalam Ekspor Kelapa Sawit ke India Tahun 2014–2019," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan* 2, no. 1 (2021): 133–140.

⁴ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Indonesia–India Trade Statistics 2023*, informasi pada "India" (Ditjen PPI), diakses pada 7 September 2025, melalui <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/asiaselatan-tengah-timur/india>

rata-rata pangsa sawit sebesar 65,57%.⁵ Di sisi lain, Indonesia mengimpor beberapa produk dari India, seperti gula mentah, beras, tekstil, dan obat-obatan. Hubungan perdagangan ini menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan.

Berikut data ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke beberapa negara tujuan.⁶

Tabel 1. 1 Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ke Negara Tujuan

No	Negara Tujuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Berat bersih: 000 Ton									
1	India	7.376,8	6.415,8	4.655,3	4.631,9	3.101,8	4.999,3	5.406,9	4.287,4
2	Tiongkok	3.209,3	4.216,4	5.983,1	4.483,5	4.860,0	4.278,7	5.440,9	3.593,8
3	Pakistan	2.194,1	2.459,6	2.217,0	2.490,9	2.679,6	2.811,2	2.513,6	3.006,0
4	Belanda	1.428,6	1.262,3	1.103,7	765,5	580,1	551,5	392,8	450,4
5	Amerika Serikat	1.159,3	1.120,9	1.195,4	1.130,3	1.650,8	1.809,8	1.984,6	1.605,3

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah oleh penulis.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, India menempati posisi dalam lima besar negara tujuan ekspor utama *palm oil* Indonesia selama periode 2017–2024. Meskipun terjadi fluktuasi volume ekspor dari tahun ke tahun, India tetap menjadi salah satu negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Dominasi India sebagai pasar utama terlihat dari besarnya volume ekspor yang mencapai jutaan ton setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar India memiliki peranan strategis bagi keberlanjutan ekspor kelapa sawit Indonesia. Namun, ketergantungan

⁵ Z. Latifah and K. Kadir, “Performa Komoditas Minyak Sawit Indonesia di Tataran Global: Mampukah Kita Menjadi Pemain Kunci?,” *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)* 14, no. 3 (2021): 250–268.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012–2024*, Jakarta: BPS, diakses pada 15 Oktober 2025, <https://www.bps.go.id>

tersebut juga membuat Indonesia rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan India, terutama kebijakan peningkatan tarif impor *palm oil* dari Indonesia.

Pemerintah India menaikkan tarif impor untuk *crude palm oil* Indonesia pada tahun 2018 menjadi 44% yang semula hanya 30% dan *refined palm oil* 54% dari semula 40%.⁷ Hal ini secara langsung membuat harga minyak sawit Indonesia di India menjadi lebih mahal yang mengakibatkan penurunan signifikan jumlah ekspor Indonesia ke India pada tahun tersebut. Penerapan tarif impor yang lebih tinggi menjadi hambatan bagi masuknya minyak sawit dari Indonesia. Kebijakan yang ditetapkan India memengaruhi arus perdagangan sawit Indonesia ke India. Sehingga, situasi tersebut menuntut Indonesia untuk mencari solusi guna melindungi kepentingan ekonominya.

Menghadapi kebijakan tarif tersebut, Indonesia mulai mengambil langkah-langkah strategis melalui jalur diplomasi ekonomi. Sebagaimana menurut Okano-Heijmans, diplomasi ekonomi merupakan strategi dan praktik kebijakan luar negeri suatu negara yang berpijak pada prinsip bahwa kepentingan ekonomi dan kepentingan politik saling menguatkan satu sama lain, sehingga keduanya harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh.⁸ Ini terlihat dari beberapa praktek diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan awal dengan pemerintah India untuk melakukan lobi berupa pengiriman surat permohonan (*appeal*) kepada pemerintah India. Surat tersebut bertujuan agar India bersedia meninjau kembali besaran tarif bea masuk minyak

⁷ Purba dan Ardiyanti, "Dinamika Kerjasama Perdagangan Indonesia...", hlm. 138.

⁸ Maaïke Okano-Heijmans, "Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies," *The Hague Journal of Diplomacy* Vol. 6, No. 1–2 (2011).

sawit yang dikenakan terhadap Indonesia.⁹ Selain langkah awal tersebut, Indonesia terus mengintensifkan berbagai upaya lanjutan melalui pendekatan diplomasi ekonomi guna memengaruhi kebijakan perdagangan India agar bersedia menurunkan kembali tarif impor *palm oil*.

Dalam melakukan pendekatan diplomasi ekonomi, Indonesia mengandalkan mekanisme jalur diplomasi dalam kerangka ASEAN-India *Free Trade Area* (AIFTA) untuk menekan hambatan tarif *palm oil*. Namun, implementasi AIFTA ternyata belum mampu menjangkau produk hilir seperti RBDPO yang masih dikenakan tarif tinggi sebesar 50%. Penetapan tarif tinggi ini membuat diplomasi dalam AIFTA belum cukup melindungi kepentingan Indonesia di pasar India. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melengkapi upaya tersebut dengan diplomasi ekonomi berupa strategi *trade-off* pada tahun 2019, di mana Indonesia membuka pasar bagi impor beras dan gula mentah dari India. Strategi yang dilakukan menunjukkan diplomasi ekonomi menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam menjaga keberlanjutan ekspor sawit ke India, sekaligus melindungi kepentingan petani dan industri hilir di dalam negeri.

Upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan tarif impor minyak sawit oleh India. Pada Januari 2019, tarif bea masuk *crude palm oil* (CPO) diturunkan dari 44% menjadi 40%, sementara tarif *refined, bleached, deodorized palm oil* (RBDPO) diturunkan

⁹ CNBC Indonesia, "Ini Strategi Supaya Ekspor CPO RI ke India Naik Rp 2 T," *CNBC Indonesia*, 14 Desember 2018, diakses 8 Januari 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181214174135-4-46482/ini-strategi-supaya-ekspor-cpo-ri-ke-india-naik-rp-2-t>

dari 54% menjadi 50%.¹⁰ Perubahan tarif bea masuk oleh India memberikan dampak besar terhadap naiknya volume impor *palm oil* dari Indonesia. Keberhasilan ini menjadi pencapaian penting mengingat India merupakan tarif negara dengan kekuatan ekonomi yang besar dan posisi tawar yang kuat. Penurunan tersebut membuka kembali peluang pasar bagi minyak sawit Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut turut meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar India. Hal ini menunjukkan efektivitas diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi negara mitra yang kuat.

Penurunan tarif impor minyak sawit oleh India tidak terlepas dari strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan tarif dalam perdagangan internasional. Perkembangan ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kebijakan tarif dan hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan India. Keberhasilan penurunan tarif impor minyak kelapa sawit menunjukkan bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dirancang dan dijalankan. Penting untuk mengkaji bentuk, proses, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan diplomasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis strategi diplomasi ekonomi Indonesia terhadap India dalam menurunkan tarif impor *palm oil*.

1.2 Rumusan Masalah

Hubungan perdagangan Indonesia dengan India yang ditandai dengan tingginya ketergantungan India terhadap minyak sawit, namun di sisi lain terdapat

¹⁰ Moch Faisal Karim dan Claeri Tiffani, "The Limits of Indonesia and India Trade Cooperation: The Case of Import Tariffs on Refined Palm Oil 2019–2020," *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 11, no. 1 (2022): 1–13.

kebijakan proteksionis berupa hambatan tarif terhadap produk *crude palm oil* (CPO) dan *refined, bleached, deodorized palm oil* (RBDPO) Indonesia. Untuk merespons kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia mulai melakukan pendekatan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi digunakan sebagai instrumen untuk memengaruhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah India dalam upaya menurunkan tarif impor *palm oil*. Dalam pelaksanaannya, Indonesia memanfaatkan berbagai instrumen dan kerja sama, termasuk kerangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), sebagai salah satu sarana dalam mendukung proses diplomasi ekonomi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi hambatan tarif India.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “Bagaimana strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia terhadap India dalam menurunkan tarif impor *palm oil*?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia terhadap India dalam upaya menurunkan tarif impor *palm oil*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat positif sebagai berikut.

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai dinamika perdagangan komoditas strategis, seperti *palm oil*, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Indonesia memanfaatkan diplomasi ekonomi untuk menghadapi hambatan tarif dari negara mitra dagang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan di sektor perdagangan, dalam merumuskan strategi diplomasi ekonomi yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku industri *palm oil* dalam memahami tantangan perdagangan di pasar India serta strategi yang dapat mendukung keberlanjutan ekspor.

1.6 Studi Pustaka

Melalui beragamnya data yang diriset, penelitian ini diharapkan mampu menjawab keraguan yang muncul sekaligus data yang diperoleh juga mampu memberikan pemahaman untuk kelancaran penelitian. Penulis telah menelaah sedikitnya lima karya ilmiah dari lingkup nasional maupun internasional yang relevan. Sejumlah karya ilmiah tersebut kemudian dijadikan dasar utama dalam penyusunan penelitian ini.

Pertama, peneliti merujuk pada artikel yang berjudul “*Economic Diplomacy as A Subject and Research Agenda: Pratical, Conceptual Methodological Issue*”

yang ditulis oleh Pantri Muthriana Erza Killian.¹¹ Diplomasi ekonomi dalam dua dekade terakhir mengalami peningkatan signifikan baik sebagai praktik kebijakan luar negeri maupun sebagai bidang kajian akademik. Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya interaksi ekonomi antarnegara serta pergeseran orientasi diplomasi dari isu keamanan tradisional menuju isu non-tradisional, khususnya ekonomi. Killian menjelaskan bahwa negara-negara seperti Australia, Jepang, Cina, dan Indonesia telah merekonstruksi instrumen kebijakan luar negeri mereka dengan menempatkan diplomasi ekonomi sebagai agenda utama.

Secara historis, praktik diplomasi ekonomi bukanlah hal baru. Aktivitas ekonomi telah menjadi bagian dari diplomasi sejak era klasik melalui perdagangan lintas wilayah, negosiasi dagang, dan pembentukan urusan perdagangan. Namun Meskipun praktiknya telah berlangsung lama, kajian akademik yang secara khusus dan sistematis membahas diplomasi ekonomi baru berkembang pesat sejak akhir perang dingin. Pada periode ini, meningkatnya globalisasi ekonomi dan ketergantungan antarnegara mendorong lahirnya perhatian akademik terhadap dimensi ekonomi dalam hubungan internasional. Dalam literatur, diplomasi ekonomi dipahami secara beragam. Bayne dan Woolcock memandang diplomasi ekonomi sebagai proses pengambilan keputusan dan negosiasi dalam hubungan ekonomi internasional. Sementara itu, Okano-Heijmans mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai strategi yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan politik secara simultan. Keragaman definisi ini menunjukkan bahwa hingga kini belum terdapat kesepakatan konseptual yang mapan mengenai diplomasi ekonomi.

¹¹ Pantri Muthriana Erza Killian, "Economic Diplomacy as A Subject and Research Agenda: Practical, Conceptual and Methodological Issue / Diplomasi Ekonomi Sebagai Kajian dan Agenda Riset: Isu Praktis, Konseptual dan Metodologis," *Global Strategis* Vol. 15, No. 1 (2021).

Selain perbedaan definisi, literatur ini juga menunjukkan kajian diplomasi ekonomi dari sisi metodologis. Diplomasi ekonomi berada di persimpangan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi, dua bidang yang memiliki ontologi dan epistemologi berbeda. Penelitian yang berbasis ekonomi cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak diplomasi terhadap perdagangan dan investasi, sementara pendekatan politik lebih menekankan analisis kualitatif melalui studi kasus, negosiasi, dan kebijakan luar negeri. Dikotomi ini menyebabkan minimnya penggunaan metode campuran serta terbatasnya dialog lintas disiplin dalam kajian diplomasi ekonomi. Literatur juga menunjukkan keterbatasan dalam kerangka analisis yang secara khusus dikembangkan untuk mengkaji diplomasi ekonomi. Sebagian besar penelitian masih meminjam teori dan model dari ekonomi internasional, hubungan internasional, atau ekonomi politik internasional.

Artikel ini membantu penulis pada penyediaan kerangka analitis mengenai bagaimana diplomasi ekonomi dijalankan oleh suatu negara dalam menghadapi dinamika internasional. Selain itu, artikel ini mampu memetakan perkembangan literatur diplomasi ekonomi secara historis, mulai dari praktik klasik hingga kajian kontemporer, sekaligus mengidentifikasi berbagai perdebatan konseptual terkait definisi, batasan, dan varian diplomasi ekonomi. Pemaparan ini membantu memberikan konteks teoritis yang jelas mengenai bagaimana diplomasi ekonomi dipahami dan diklasifikasikan dalam literatur akademik.

Kedua, referensi juga diambil oleh peneliti dari artikel jurnal yang berjudul “Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di

Indonesia” ditulis oleh Jhon Maxwell Yosua Pattinussa.¹² Presiden Joko Widodo berperan dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia, terutama dalam konteks hubungan internasional yang semakin dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Penelitian menjelaskan bahwa Jokowi memandang diplomasi sebagai instrumen langsung untuk mendukung pembangunan nasional, sehingga orientasi politik luar negeri lebih diarahkan pada pencapaian hasil konkret dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Fokus utama Jokowi adalah menjadikan diplomasi ekonomi sebagai prioritas dengan menekankan pendekatan pragmatis, proaktif, dan berbasis kepentingan nasional. Hal ini tercermin dalam dorongan pemerintah terhadap peningkatan ekspor non-migas, pencarian pasar baru, serta penguatan kerjasama dagang bilateral maupun multilateral. Ambisi Presiden Joko Widodo dalam membangun perekonomian dapat dilihat misalnya saja pemotongan aturan/persyaratan surat izin usaha, serta kehadiran OSS (*Online Single Submission*) pada masa pemerintahan periode pertama, yang mana dalam hal ini ada *trade off* yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan memotong administrasi (termasuk pajak) supaya semakin banyak pelaku bisnis asing maupun domestik yang membuka bisnis di Indonesia.

Artikel menyoroti Presiden Joko Widodo sebagai tokoh kunci dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dengan menonjolkan aspek kepribadian, latar belakang, dan gaya kepemimpinan yang lebih bersifat transaksional. Sebaliknya, skripsi ini memusatkan perhatian pada strategi konkret

¹² J. M. Y. Pattinussa, “Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia,” *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 1, no. 2 (2021).

diplomasi ekonomi Indonesia dalam mengatasi hambatan tarif terhadap produk sawit di pasar India, sehingga fokusnya lebih sempit dan teknis pada isu perdagangan komoditas tertentu. Dengan demikian, artikel tersebut mengedepankan analisis pada tingkat makro terkait kepemimpinan dan kebijakan luar negeri, sementara skripsi menekankan implementasi praktis diplomasi ekonomi terhadap satu produk strategis.

Artikel jurnal ini membantu penulis dalam menganalisis diplomasi ekonomi selama era Joko Widodo. Selain itu, penjelasan tentang gaya kepemimpinan Jokowi yang pragmatis dan transaksional membantu memperkuat konteks politik di balik strategi Indonesia dalam bernegosiasi dengan India. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi sebagai sumber referensi konseptual dan kontekstual yang memperjelas hubungan antara kepemimpinan nasional dan strategi diplomasi ekonomi sektoral, khususnya dalam menghadapi hambatan tarif *palm oil* India.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Windasari Purba dan Dwi Ardiyanti dengan judul “Dinamika Kerjasama Perdagangan Indonesia dalam Ekspor Kelapa Sawit ke India Tahun 2014-2019”¹³ Minyak kelapa sawit merupakan sumber bahan baku untuk minyak goreng yang diperdagangkan pada pasar global dan 50% produk yang dijual di pasar swalayan menggunakan minyak kelapa sawit. Indonesia sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia dan India sebagai konsumen utama memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas perdagangan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fluktuasi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia-India dipengaruhi oleh kebijakan bea masuk India.

¹³ W. Purba dan D. Ardiyanti, “Dinamika Kerjasama Perdagangan Indonesia dalam Ekspor Kelapa Sawit ke India Tahun 2014–2019,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan* 2, no. 1 (2021).

Pembahasan pada artikel jurnal ini memberikan gambaran nyata tentang diplomasi yang ditempuh Indonesia, baik melalui kerjasama bilateral maupun forum multilateral. Kerjasama inilah yang dijadikan pijakan penting untuk menganalisis efektivitas diplomasi Indonesia dalam mempertahankan akses pasar *palm oil* di India. Fokus analisis pada penelitian ini menekankan pada aspek diplomasi, negosiasi, dan strategi politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi kebijakan proteksionis India.

Melalui literatur ini membantu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji mengenai dinamika perdagangan *palm oil* antara Indonesia dengan India. Serta, memberikan gambaran historis mengenai dinamika ekspor sawit Indonesia ke India, termasuk informasi terkait tarif, dan volume ekspor. Dengan menjadikan artikel ini sebagai referensi, penelitian ini dapat menghubungkan aspek teoritis diplomasi ekonomi dengan realitas perdagangan *palm oil* Indonesia-India dalam periode yang masih relevan.

Keempat, penulis merujuk pada artikel jurnal “Daya Saing Ekspor *Crude Palm Oil* dan *Refined Palm Oil* Asal Indonesia dan Malaysia di Pasar India” karya Zainuddin.¹⁴ Hasilnya menunjukkan bahwa daya saing ekspor CPO Indonesia relatif stabil, sementara Malaysia mengalami penurunan perlahan. Sebaliknya, daya saing RPO sempat turun pada 1996–2013, namun menguat kembali pada 2014–2019. Faktor utama yang memengaruhi daya saing CPO Indonesia meliputi volume ekspor Malaysia, pajak ekspor Indonesia, tarif impor India, nilai tukar Rupiah, dan harga CPO dunia. Sedangkan daya saing RPO dipengaruhi oleh volume ekspor

¹⁴ Z. Zainuddin, “Daya Saing Ekspor *Crude Palm Oil* dan *Refined Palm Oil* Asal Indonesia dan Malaysia di Pasar India,” *Jurnal MeA (Media Agribisnis)* 7, no. 2 (2022).

Malaysia, nilai tukar Rupiah, harga ekspor RPO, harga minyak kedelai, dan tarif impor India.

Perbedaan mendasar artikel ini lebih menekankan aspek ekonomi dengan analisis kuantitatif mengenai daya saing serta faktor-faktor yang memengaruhi performa *palm oil* Indonesia dibanding Malaysia. Sementara itu, penelitian ini akan menyoroti aspek diplomasi ekonomi, yakni strategi yang ditempuh Indonesia dalam menghadapi hambatan tarif dari India. Dengan kata lain, artikel ini menjelaskan apa yang terjadi pada daya saing dan faktor penyebabnya, sementara penelitian ini akan mengkaji bagaimana respon diplomasi Indonesia dalam menyiasati kebijakan tarif India.

Artikel ini akan membantu memberikan gambaran mengenai kondisi daya saing *palm oil* Indonesia di India, yang dapat menjadi dasar analisis mengapa strategi diplomasi diperlukan. Lalu, artikel ini menegaskan peran faktor eksternal seperti kebijakan tarif India dan persaingan dengan Malaysia, yang relevan sebagai konteks latar belakang penelitian. Selain itu, penelitian Zainuddin juga memberikan gambaran mengenai pengaruh kebijakan perdagangan India terhadap kinerja ekspor minyak sawit Indonesia. Hal ini berguna untuk memperkuat argumen bahwa penurunan tarif impor tidak hanya berdampak pada volume ekspor, tetapi juga pada posisi tawar Indonesia dalam hubungan bilateral dengan India.

Kelima, penulis merujuk pada artikel jurnal “Implementasi Diplomasi Indonesia dalam Perang Dagang terhadap Uni Eropa” karya Melda Alani Sitompul dan Ibnu Zulian.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Indonesia merespons

¹⁵ M. A. Sitompul dan I. Zulian, “Implementasi Diplomasi Indonesia dalam Perang Dagang terhadap Uni Eropa,” *Global Insight Journal* 1, no. 2 (2024).

diskriminasi sawit Uni Eropa melalui diplomasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konsep *self-help* dalam hubungan internasional. Artikel jurnal ini menitikberatkan pada hubungan Indonesia-Uni Eropa, dengan isu diskriminasi sawit berbasis lingkungan (deforestasi) dan kebijakan RED II. Sehingga dijelaskan berbagai strategi diplomasi Indonesia, mulai dari diplomasi bilateral dan multilateral, kampanye sawit berkelanjutan, kerjasama dengan negara produsen sawit lain melalui CPOPC, hingga langkah hukum di WTO.

Penelitian ini juga menyroti peran aktor negara, seperti pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan dan menjalankan strategi diplomasi untuk merespons kebijakan perdagangan oleh Uni Eropa. Selain membahas strategi dan aktor, artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Tantangan tersebut antara lain perbedaan kepentingan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa, kompleksitas regulasi perdagangan Internasional, serta ketimpangan posisi tawar dalam hubungan dagang. Artikel ini menyimpulkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi perang dagang terhadap Uni Eropa merupakan upaya strategis untuk menjaga akses pasar dan melindungi daya saing produk nasional.

Artikel ini berkontribusi memberikan perspektif komparatif bahwa isu diskriminasi dan hambatan terhadap sawit bukan hanya datang dari India, tetapi juga dari Uni Eropa. Hal ini memperkaya analisis skripsi dengan menunjukkan pola umum tantangan global yang dihadapi Indonesia dalam diplomasi sawit. Selain itu, artikel ini memberikan contoh konkret strategi diplomasi Indonesia dalam forum internasional, seperti WTO dan CPOPC, yang bisa dijadikan pijakan teoretis

maupun praktis untuk membandingkan efektivitas strategi serupa dalam kasus Indonesia-India. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat kerangka analisis skripsi, khususnya dalam melihat keterkaitan antara kebijakan perdagangan, kepentingan ekonomi nasional dan peran diplomasi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi merupakan salah satu bentuk diplomasi yang berkembang seiring dengan meningkatnya keterhubungan global, di mana aspek ekonomi semakin menempati posisi penting dalam hubungan antarnegara. Konsep ini menggabungkan dimensi politik luar negeri dengan kepentingan ekonomi, sehingga menjadikan diplomasi tidak hanya berfokus pada isu keamanan atau politik, tetapi juga pada perdagangan, investasi, energi, serta pembangunan. Diplomasi ekonomi mencakup interaksi antara pemerintah, dunia usaha, serta organisasi internasional untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi lintas negara.¹⁶ Diplomasi ekonomi berfungsi sebagai sarana bagi negara untuk memperoleh keuntungan kompetitif, memperluas akses pasar, serta melindungi kepentingan ekonominya di tengah dinamika global. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi dipandang sebagai instrumen strategis yang memungkinkan negara untuk menyeimbangkan kepentingan domestik dan tuntutan internasional dalam satu kerangka kebijakan luar negeri.

¹⁶ Saner, Raymond, and Lichia Yiu. *International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times*. Vol. 84. The Hague: Netherlands Institute of International Relations "Clingendael," 2003.

Selama beberapa dekade, diplomasi ekonomi terpinggirkan dalam studi diplomasi hingga pada tahun 1980-1990-an, terjadi pergeseran dalam diskursus global dan isu ekonomi naik menjadi salah satu isu penting dalam relasi antarnegara. Berakhirnya perang dingin dan meningkatnya relasi ekonomi antarnegara secara masif mendorong negara-negara untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya. Hal ini mendorong diplomasi ekonomi menjadi salah satu isu sentral dan kajian modern. Tahun 1990-2000-an dikatakan sebagai ‘era konsolidasi’ dalam studi diplomasi ekonomi, yang ditandai dengan makin solidnya diplomasi ekonomi sebagai bidang kajian.¹⁷ Sebagai contoh *economic statecraft* mulai digunakan untuk menjelaskan kajian yang menitikberatkan pada pencapaian tujuan politik luar negeri melalui aktivitas ekonomi. Pada tahun 2000 hingga sekarang menandai perkembangan pesat dari kajian diplomasi ekonomi, seiring dengan praktik negara-negara yang juga mulai meningkat.

Diplomasi ekonomi bukanlah sebuah praktik baru, meskipun secara keilmuan bisa dikatakan sebagai sebuah kajian baru yang bergantung kepada beberapa pemikiran lama.¹⁸ Dapat dilihat secara historis, pada awalnya diplomasi ekonomi dijalankan secara terbatas melalui aktivitas perdagangan antarnegara dan perjanjian dagang. Seiring berjalannya waktu, isu ekonomi mulai menempati posisi penting dan praktik diplomasi ekonomi terus berkembang seiring dengan perubahan sistem ekonomi dan politik internasional. Praktik diplomasi ekonomi juga cenderung mengalami fase naik-turun karena peristiwa global tertentu bisa

¹⁷ P. M. E. Killian, “Diplomasi Ekonomi Sebagai Kajian dan Agenda Riset: Isu Praktis, Konseptual dan Metodologis,” *Global &* 15, no. 1 (2021): 51–78.

¹⁸ Killian, “Diplomasi Ekonomi sebagai Kajian dan Agenda Riset,” 55.

menaikkan atau menurunkan status isu ekonomi sebagai permasalahan sentral dalam hubungan antarnegara.

Diplomasi ekonomi berkaitan dengan isu-isu kebijakan ekonomi, seperti partisipasi delegasi dalam organisasi pembuat standar seperti WTO. Diplomat ekonomi juga mengawasi dan melaporkan kebijakan ekonomi di negara lain serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah negara asal tentang cara terbaik untuk memengaruhi kebijakan tersebut. Diplomasi ekonomi memanfaatkan sumber daya ekonomi, baik dalam bentuk insentif maupun sanksi, guna mencapai tujuan kebijakan luar negeri tertentu. Pendekatan ini sering disebut sebagai "*economic statecraft*".¹⁹ Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan bantuan kepada perusahaan domestik, seperti bantuan hukum, insentif ekspor, dan dukungan teknis ketika dibutuhkan. Bantuan ini juga termasuk membantu perusahaan dalam negeri untuk membuka anak perusahaan di pasar luar negeri.

Setiap upaya diplomasi ekonomi melibatkan berbagai macam kegiatan dan bentuk ekspresi. Negara-negara akan lebih berhasil dalam diplomasi ekonomi jika mereka meningkatkan jumlah kegiatan, merancang cara-cara baru untuk melaksanakan diplomasi ekonomi, atau menghentikan kegiatan yang terbukti tidak berhasil. Diplomasi ekonomi lebih dari sekedar jumlah kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara.²⁰ Oleh karena itu, diplomasi ekonomi harus dipahami sebagai proses strategis yang menekankan pada efektivitas, konsistensi, dan kesesuaian antara aktivitas diplomatik dengan kepentingan ekonomi nasional.

¹⁹ G. R. Berridge, *A Dictionary of Diplomacy* (New York: Palgrave Macmillan, 2003).

²⁰ Peter A. Bergeijk, Maaike Okano-Heijmans, and Jan Melissen, eds., *Economic Diplomacy: Economic and Political Perspectives*, vol. 1 (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011).

Menurut Kejin definisi yang paling sesuai, bahwa diplomasi ekonomi dapat dipandang sebagai “kegiatan damai yang dilakukan oleh negara atau persatuan negara-negara untuk menyelesaikan gesekan dan sengketa di antara negara-negara dalam urusan ekonomi saat menerapkan kebijakan luar negeri tertentu.”²¹ Diplomasi ekonomi bukan hanya soal negosiasi perdagangan antarnegara, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kerjasama yang lebih luas lagi. Bayne dan Wilcock menyebutkan bahwa diplomasi ekonomi menggunakan berbagai macam alat mencakup seluruh spektrum tindakan, mulai dari negosiasi informal dan kerja sama sukarela, melalui regulasi yang bersifat lunak (seperti kode etik), hingga pembentukan dan penegakan aturan yang mengikat, sambil mencatat bahwa kemajuan biasanya dicapai melalui persuasi dan kesepakatan bersama, meskipun diplomasi ekonomi juga dapat bersifat konfrontatif.²² Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi menjadi sarana untuk menghasilkan nilai bersama lintas batas melalui koordinasi antar aktor masing-masing negara.

Dalam studi diplomasi ekonomi negara berkembang, Kishan S. Rana mengembangkan konsep strategi diplomasi ekonomi berdasarkan pengalaman India, pengamatan praktik negara-negara berkembang lain, serta sintesis pemikirannya. Konsep ini berguna untuk menganalisis bagaimana negara berkembang menerapkan diplomasi ekonomi melalui empat tahap utama.²³

²¹ Zhao Kejin, *The Rise of Economic Diplomacy: Substances, Institutions and Trends* (dalam bahasa Mandarin), *Jiao Xue Yu Yan Jiu [Teaching and Studies]*, Vol. 1, 2011, hlm. 57, dikutip dalam Usman W. Chohan, *Diplomasi Ekonomi: Sebuah Tinjauan*, (Makalah Kerja CASS tentang Ekonomi & Urusan Nasional, 2021), hlm. 3.

²² Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock, *The New Economic Diplomacy*, Edisi ke-4 (London: Routledge, 2017), hlm. 23, dikutip dalam Usman W. Chohan, *Diplomasi Ekonomi: Sebuah Tinjauan*, Makalah Kerja CASS tentang Ekonomi & Urusan Nasional, Januari 2021, hlm. 6.

²³ Kishan S. Rana dan Bipul Chatterjee (ed.), *Economic Diplomacy: India's Experience* (Jaipur: CUTS International, 2011).

1. *Economic salesmanship*

Economic salesmanship dilaksanakan oleh lembaga resmi seperti Kementerian Luar Negeri, di mana negara mengirim duta besar dan diplomat sebagai utusan ke negara tujuan. Istilah *salesmanship* menurut Rana merujuk pada upaya promosi dan penjualan produk kepada pihak tertentu. Fase ini menegaskan bahwa perdagangan dan investasi menjadi elemen krusial diplomasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui peningkatan devisa.

Peran diplomat dapat mempromosikan produk. Kegiatan pengenalan produk unggulan dalam negeri oleh duta besar dan diplomat dapat memanfaatkan jaringan politik dengan pembuat kebijakan setempat. Fase ini menjadi fondasi penting diplomasi ekonomi karena membuka peluang baru di bidang perdagangan dan investasi. Berfokus pada pembangunan jejaring, advokasi, serta koalisi antara level domestik (*home country*) dan internasional (*abroad*).

2. *Economic networking and advocacy*

Negara berkembang masih cenderung fokus pada tahap awal "promosi dan penjualan" dalam diplomasi ekonomi. Berbeda dengan fase pertama, tahap kedua melibatkan peran lebih luas dari berbagai pihak seperti perusahaan swasta, lembaga pemikir (*think tank*), individu, serta mitra institusi lainnya. Melalui jaringan dan advokasi ini, promosi perdagangan, investasi, perolehan teknologi, dan aktivitas

ekonomi lainnya dapat menjangkau lebih efektif melalui keterlibatan berbagai aktor diplomasi ekonomi.

3. *Image Building*

Image Building atau *Image Promotion* merupakan upaya promosi citra dan nama baik negara melalui kemitraan publik-swasta, yang bertujuan membentuk branding negara, khususnya lewat promosi pariwisata guna menarik wisatawan mancanegara. Bertujuan membentuk citra negara (*branding*), terutama lewat promosi pariwisata untuk menarik wisatawan mancanegara.

4. *Regulatory Management*

Fase terakhir, diplomasi ekonomi berfokus pada dua aspek utama, yaitu pengaturan regulasi dan pembentukan citra negara. Praktik diplomasi ekonomi yang melibatkan beragam aktor memerlukan regulasi jelas untuk mengelola aktivitas ekonomi di ranah bilateral, regional, maupun multilateral. Bentuknya mencakup negosiasi perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*), perjanjian akses energi, serta diplomasi regional melalui pengelompokan baru, di mana pemerintah bertanggung jawab atas negosiasi pembentukan kerja sama ekonomi internasional. Dengan demikian, diharapkan tercipta kemudahan bagi diplomasi ekonomi baik oleh aktor negara maupun non-negara.

Dengan demikian, strategi diplomasi ekonomi tidak hanya bergantung pada aktivitas promosi perdagangan dan investasi semata, tetapi juga pada kemampuan negara dalam membangun koordinasi kelembagaan, mengelola regulasi

internasional, serta memanfaatkan jaringan diplomatik secara strategis untuk mendukung kepentingan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi harus dijalankan secara terarah dan terintegrasi sesuai dengan kepentingan nasional. Strategi diplomasi ekonomi ini memungkinkan negara untuk mengoptimalkan peluang ekonomi sekaligus meminimalkan risiko dalam perdagangan internasional.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴ Dengan kata lain, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman yang memastikan bahwa penelitian dilakukan secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsi utama metode penelitian adalah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Metode penelitian merupakan rancangan atau rencana penelitian yang menghubungkan filosofi penelitian dengan prosedur pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil.²⁵ Oleh karena itu, keberadaan metode penelitian menjadi penting untuk menjaga konsistensi antara rumusan masalah, tujuan, hingga hasil penelitian yang diharapkan.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 2.

²⁵ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk merumuskan masalah yang mengarahkan penelitian dalam menggambarkan situasi sosial secara komprehensif, luas, dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor, seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati.²⁶ Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena yang diteliti bersifat kompleks, kontekstual, dan terkait dengan interaksi kebijakan luar negeri, keputusan diplomasi, serta dinamika perdagangan internasional, sehingga membutuhkan pemahaman mendalam mengenai praktik dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.²⁷ Jenis penelitian kualitatif ini memaparkan kondisi nyata terkait hambatan tarif India, kebijakan diplomasi Indonesia, dan respons pelaku terkait dalam konteks perdagangan internasional.

Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena secara menyeluruh dan mendalam, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi strategi, tantangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas diplomasi perdagangan Indonesia. Pendekatan ini juga mendukung penarikan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis, sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengungkap strategi diplomasi perdagangan Indonesia menghadapi hambatan tarif *palm oil* India.

²⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4

²⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014), hlm. 13–15.

1.8.2. Batasan Penelitian

Pembahasan batasan dalam penelitian bertujuan untuk memperjelas dan membatasi fokus pada pokok permasalahan yang hendak diteliti. Pada batasan penelitian membahas ruang lingkup untuk menentukan konsep utama sehingga persoalan penelitian dapat dipahami dengan lebih mudah. Ruang lingkup penelitian juga berfungsi menegaskan batasan-batasan objek penelitian supaya proses pengumpulan data dan analisis menjadi lebih terarah dan efisien.

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi hambatan tarif *palm oil* yang diberlakukan oleh India. Fokus penelitian diarahkan pada periode tahun 2018 hingga 2023, mengingat rentang waktu tersebut menandai dinamika signifikan dalam hubungan perdagangan Indonesia-India terkait komoditas *palm oil*.

Pemilihan rentang waktu penelitian didasarkan pada pertimbangan historis dan relevansi dinamika perdagangan Indonesia-India. Tahun 2018 menjadi titik awal karena pada saat itu India mulai menerapkan kebijakan kenaikan tarif impor terhadap CPO dan RBDPO yang menimbulkan ketegangan dalam hubungan dagang kedua negara. Sedangkan tahun 2023 dipilih sebagai batas akhir karena pada periode ini mencerminkan perkembangan terbaru dalam hubungan perdagangan kedua negara.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis yaitu objek atau fokus utama penelitian yang menjadi sasaran kajian dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian. Unit analisis adalah semua elemen yang diteliti untuk memberikan pemahaman singkat tentang keseluruhan objek yang sedang dipelajari, unit analisis bisa berupa individu, objek,

atau peristiwa, seperti aktivitas yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok sebagai fokus penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah strategi diplomasi perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia. Sementara itu, unit eksplanasi adalah sesuatu yang berpengaruh terhadap unit analisis yang akan diamati.²⁹ Dalam penelitian ini, unit eksplanasinya ialah menurunnya tarif India terhadap impor *palm oil* Indonesia. Penurunan tarif tersebut menjadi faktor penting yang mendorong Indonesia untuk menjalankan strategi diplomasi ekonomi untuk mengatasi hambatan tarif.

Menurut Kennet N. Waltz dalam bukunya *Man, the State, and War* level analisis dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu analisis pada tingkat individu, tingkat negara, dan tingkat sistem internasional.³⁰ Level analisis membantu peneliti menentukan pada tingkatan mana fenomena internasional akan di analisis, pada penelitian ini level analisis yang digunakan adalah negara. Hal ini karena negara diposisikan sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan strategi diplomasi, melakukan perundingan, serta mengambil keputusan politik dan ekonomi untuk melindungi kepentingan nasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan unsur yang sangat krusial dalam suatu penelitian, sehingga metode pengumpulan data harus dilakukan dengan tepat untuk menghindari kesalahan penelitian yang disebabkan oleh data yang tidak akurat. Teknik pengumpulan data adalah proses memperoleh data empiris dari responden

²⁸ Morissan, *Metode Penelitian Komunikasi: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 166.

²⁹ Ulber Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press. Pp. 121-123.

³⁰ Waltz, Kenneth N. *Man, the State, and War: A Theoretical Analysis*. New York: Colombia University Press. 2001. Hlm. 16-223.

menggunakan metode yang telah ditetapkan.³¹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur yang relevan, seperti buku *International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times* oleh Raymond Saner & Lichia Yiu dan *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations* oleh Bayne, Nicholas & Stephen Woolcock.

Selanjutnya, sumber penelitian ini juga di dapat dari artikel jurnal, artikel jurnal yang membahas daya saing sawit Indonesia di pasar global yaitu *Performa Komoditas Minyak Sawit Indonesia di Tataran Global: Mampukah Kita Menjadi Pemain Kunci?* JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics) yang ditulis oleh Latifah, Z., & Kadir, K. Serta artikel jurnal lainnya seperti *Perdagangan Minyak Sawit Indonesia ke India: Analisis Ecologically Unequal Exchange* yang ditulis oleh Yosua Saut Marulitua Gultom. Dan penelitian ini juga mengambil sumber dari laporan resmi pemerintah, seperti publikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan informasi yang tersedia melalui situs web resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Lalu, sumber lainnya yang memiliki nilai ilmiah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memahami strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi hambatan tarif minyak sawit di India, termasuk kebijakan bilateral, mekanisme multilateral, serta langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh aktor dan institusi terkait.

Dalam mengumpulkan literatur terkait, peneliti mencari menggunakan kata kunci seperti “Diplomasi ekonomi”, “Strategi diplomasi”, “Kerjasama ekonomi”, “Ekspor *palm oil*”, “Diplomasi Indonesia-India”, “Hambatan Tarif”, dan

³¹ Ulber Silalahi. Opcit. pp.257.

“Kebijakan ekonomi”. Pencarian literatur dengan kata kunci tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan relevan dengan topik penelitian, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi diplomasi perdagangan Indonesia terhadap India dalam penurunan tarif *palm oil*.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Menurut John W. Tukey, analisis data adalah suatu prosedur dalam mengolah data, termasuk teknik-teknik untuk menafsirkan hasil analisis, yang didukung oleh proses pengumpulan data agar analisis menjadi lebih mudah, tepat, dan akurat.³² Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis agar dapat dipahami serta diinformasikan kepada pembaca. Teknik analisis data berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang terstruktur sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari literatur, seperti buku, artikel jurnal, laporan resmi pemerintah (misalnya Kementerian Perdagangan dan GAPKI), serta sumber daring kredibel lainnya akan dianalisis dengan cara mengidentifikasi informasi yang relevan, mengelompokkan berdasarkan tema (misalnya kebijakan tarif India, respons diplomasi Indonesia, dan implikasi ekonomi), kemudian menyajikannya secara sistematis. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menafsirkan makna di balik kebijakan perdagangan India serta strategi diplomasi yang ditempuh Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan

³² Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Andi, 2018) Hlm. 193-194.

gambaran utuh tentang bagaimana negara menggunakan diplomasi ekonomi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan nasional di sektor perdagangan strategis.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan tahap krusial untuk memastikan hasil penelitian memiliki relevansi dan makna yang kuat. Salah satu teknik analisis yang dipakai peneliti adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Jhon W. Creswell. Teknik ini terkenal karena pendekatannya yang terstruktur dalam mengelola serta memahami data kualitatif yang kompleks. Teknik analisis ini bertujuan memudahkan peneliti dalam mengelola data kualitatif yang umumnya berupa teks, wawancara, catatan lapangan, atau dokumen. Teknik analisis data ini memfokuskan pada enam komponen utama:³³

1. Mengolah dan menyusun data untuk analisis. Tahap ini mencakup transkripsi wawancara, pemindaian materi, pengetikan catatan lapangan, serta pengelompokan dan pengorganisasian data berdasarkan sumber informasinya.
2. Membaca data secara keseluruhan. Langkah awal ini bertujuan membentuk pemahaman umum (*general sense*) terhadap informasi yang terkumpul serta merefleksikan maknanya secara holistik.
3. Menganalisis secara mendalam melalui pengkodean data. *Coding* adalah proses memecah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum diinterpretasikan. Proses ini menggabungkan kode yang telah ditetapkan sebelumnya (*predetermined code*) dengan kode yang muncul

³³ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2018).

secara alami dari data (*emerging code*), sehingga kode-kode disesuaikan dengan temuan analisis.

4. Menerapkan pengkodean untuk mendeskripsikan *setting*, individu, kategori-kategori, serta tema-tema yang dianalisis. Selanjutnya, penulis akan membuat kode untuk menjelaskan semua informasi, lalu menganalisisnya. Tema-tema tersebut kemudian menjadi dasar judul pada bagian hasil penelitian.
5. Menyajikan deskripsi dan tema dalam bentuk narasi laporan kualitatif. Pendekatan naratif dapat mencakup urutan kronologis peristiwa, pembahasan tema spesifik, atau hubungan antar-tema.
6. Menginterpretasikan atau memaknai data. Tahap akhir ini mengungkap esensi gagasan utama, termasuk perbandingan hasil penelitian dengan literatur atau teori terkait.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki struktur yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab 1 merupakan bagian paling awal dari penelitian. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan latar belakang masalah, yang berfungsi untuk menggambarkan benang merah dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti juga memaparkan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang meliputi teoritis dan praktis, studi pustaka yang terdiri dari lima literatur yang berbeda dan kerangka konseptual diplomasi ekonomi. Kemudian, pada bab ini peneliti juga menyertakan metodologi penelitian, yang mencakup jenis penelitian, batasan

penelitian, untuk dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lalu, pada akhir bab ini peneliti melampirkan bagian dalam sistematika penulisan.

BAB II Kerja Sama Perdagangan Indonesia-India

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan India telah berlangsung selama puluhan tahun dan mencakup berbagai sektor. Kedua negara terus mempererat kerjasama melalui pendekatan diplomasi politik, ekonomi, maupun budaya. Dalam kerjasama ekonomi, hubungan perdagangan Indonesia-India mencakup sektor seperti kopi, teh, tekstil, *palm oil* dan produk manufaktur. Perdagangan bilateral ini didukung oleh perjanjian kerja sama ekonomi dan forum perdagangan, yang memberikan kerangka formal bagi negosiasi dan penyelesaian sengketa. Kehadiran hubungan diplomasi yang solid inilah yang menjadi fondasi penting bagi kelanjutan kerja sama perdagangan, termasuk dalam menghadapi hambatan tarif maupun isu-isu global yang memengaruhi arus ekspor-impor.

BAB III Hambatan Tarif India Terhadap *Palm Oil* Indonesia

Indonesia merupakan produsen *palm oil* terbesar di dunia, sementara India merupakan salah satu pasar utama yang menyerap ekspor minyak sawit Indonesia. Namun, penerapan tarif impor oleh India telah menimbulkan tantangan signifikan bagi kelancaran perdagangan bilateral. Hambatan ini berdampak pada nilai devisa yang diterima Indonesia.

BAB IV Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Hambatan Tarif *Palm Oil* di India

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan analisis terkait strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi hambatan tarif *palm oil* yang diberlakukan India. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mengacu pada teori diplomasi ekonomi dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan pada Bab II dan III. Secara tidak langsung bab ini akan menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat pada bab I dan menjadi hasil analisis data kualitatif untuk dapat dipahami.

BAB V Penutup

Bab V akan menjadi bagian terakhir pada penelitian yang berfungsi untuk merangkum keseluruhan hasil penelitian dan memberikan arahan atau saran berdasarkan temuan yang diperoleh. Penutup menyajikan kesimpulan penelitian dengan menyoroti inti dari temuan tanpa memperkenalkan data atau analisis baru. Selain itu, bagian ini juga menegaskan kontribusi penelitian baik secara akademik, dengan menambah literatur atau teori yang relevan, maupun secara praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan atau pihak terkait.

